

**PENGELOLAAN PULAU KECIL BERBASIS PARIWISATA: KASUS
DI PULAU PAHAWANG, KABUPATEN PESAWARAN,
PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**PUTRI WAHYUNI
NPM 2020041008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGELOLAAN PULAU KECIL BERBASIS PARIWISATA: KASUS DI PULAU PAHAWANG, KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI LAMPUNG

Oleh

PUTRI WAHYUNI

Pulau kecil diartikan sebagai pulau yang luasnya 2.000 km² terlepas dari induk pulau, dan memiliki satu kesatuan ekosistem di dalamnya. Daratan kecil yang berada ditengah laut ini tergolong rentan akan berbagai hal, baik yang disebabkan oleh manusia atau diakibatkan oleh keadaan alam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis terkait pola pemanfaatan lahan, potensi wisata, peran *stakeholder* wisata, dan mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan wisata di Pulau Pahawang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara dengan *stakeholder* dan wisatawan, dan studi literatur. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan, analisis GIS, analisis 4A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan *Ancillary Service*), analisis *stakeholder*, dan analisis implementasi kebijakan. Hasil yang diperoleh adalah pola pemanfaatan lahan yang ada meliputi agroforestri, mangrove, tambak, pemukiman dan hutan yang dilindungi oleh masyarakat. Potensi wisata yang teridentifikasi ada tujuh destinasi, yaitu wisata pantai, wisata mangrove, wisata bawah laut (snorkeling), wisata minat khusus lutung, wisata sepeda (keliling pulau), wisata pendakian, dan wisata religi. *Stakeholder* yang ada meliputi masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat/tokoh adat, badan usaha milik desa (bumdes), kelompok sadar wisata (pokdarwis), DPRD Pesawaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pesawaran, Dinas Pariwisata Pesawaran, dan *travel agent*. Pada implementasinya kebijakan yang ada belum berjalan dengan baik, hal ini diusulkan untuk mengembangkan alternatif kebijakan perihal pengelolaan pulau kecil berbasis pariwisata.

Kata kunci: Pulau kecil, Sumber Daya Alam, pariwisata, *Community Based Tourism* (CBT), agroforestri, mangrove, hutan yang dilindungi oleh masyarakat lokal, *stakeholder*, kebijakan.

ABSTRACT

SMALL ISLAND MANAGEMENT BASED ON TOURISM: THE CASE IN PAHAWANG ISLAND, PESAWARAN REGENCY, LAMPUNG PROVINCE

By

PUTRI WAHYUNI

A small island is defined as an island with an area of 2,000 km² apart from the main island and has a unified ecosystem in it. This small land in the middle of the sea is classified as vulnerable to various things, whether caused by humans or caused by natural conditions. The purpose of this research is to identify and analyze related land-use patterns, tourism potential, and the role of tourism stakeholders, and to examine the implementation of tourism management policies on Pahawang Island. Data was collected using observation, interviews with stakeholders and tourists, and literature studies. The data that has been collected is then analyzed using GIS analysis, 4A analysis (Attractions, Accessibility, Amenity, and Ancillary Service), stakeholder analysis, and analysis of policy implementation. The results obtained are the existing land use patterns including agroforestry, mangroves, ponds, settlements, and forests that are protected by the community. There are seven tourism potentials identified, namely beach tourism, mangrove tourism, underwater tourism (snorkeling), special interest tours for langurs, bicycle tours (around the island), climbing tours, and religious tourism. The existing stakeholders include the community, village government, community leaders/customary leaders, village-owned enterprises (bumdes), tourism awareness groups (pokdarwis), Pesawaran DPRD, Pesawaran Regional Development Planning Agency (Bappeda), Pesawaran Tourism Office, and travel agents. In the implementation of existing policies, it has not been going well, it is proposed to develop alternative policies regarding tourism-based small island management.

Keywords: Small islands, natural resources, tourism, *Community Based Tourism* (CBT), agroforestry, mangroves, forests protected by local communities, stakeholders, policy.

**PENGELOLAAN PULAU KECIL BERBASIS PARIWISATA: KASUS
DI PULAU PAHAWANG, KABUPATEN PESAWARAN,
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Putri Wahyuni

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut
Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **PENGELOLAAN PULAU KECIL BERBASIS
PARIWISATA: KASUS DI PULAU PAHAWANG,
KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Putri Wahyuni*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2020041008

Program Studi : Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin



1. Komisi Pembimbing

Dr. Indra Gumay Febryano
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
NIP 197402222003121001

Hari Kaskoyo
Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.
NIP 196906011998021002

2. Ketua Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut
Universitas Lampung

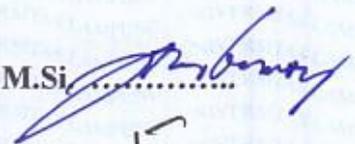
Dr. Supono

Dr. Supono, S.Pi., M.Si.
NIP 197010022005011002

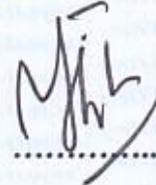
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si**



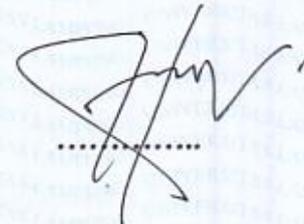
Sekretaris : **Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.**



Anggota : **Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T.**



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **23 Juni 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Pengelolaan Pulau Kecil Berbasis Pariwisata: Kasus di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
yang membuat pernyataan,



Putri Wahyuni
Putri Wahyuni
NPM. 2020041008

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Padang Cermin, 08 Agustus 1998 sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Amirson dan Ibu Hayati. Penulis menempuh pendidikan di TK Hang Tuah PWK Panjang Lampung tahun 2003-2004, SDN 1 Tambangan tahun 2004-2006, SDN 2 Bunut tahun 2006-2010, SMPN 2 Padang Cermin tahun 2010-2013, dan SMA YP Unila tahun 2013-2016. Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada tahun 2020 penulis menyelesaikan studi sebagai Sarjana Kehutanan, dengan menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Perencanaan Wisata Lutung *Trachypithecus cristatus* (Raffles, 1821) Berbasis Konservasi di Pulau Pahawang”. Penulis melanjutkan studi, pada program studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Program Pascasarjana Multidisiplin Ilmu, Universitas Lampung tahun 2020. Tahun 2021 penulis pernah mengikuti *International Conference 5th Shield 2021* sebagai penyaji dengan judul *Community and Tourist Perception of The Existence of Lutung Trachypithecus cristatus (Raffles, 1821) as Tourism Attraction Objects in Pahawang Island*. Penulis juga pernah mengikuti *Istanbul International Modern Scientific Research Congress –II* sebagai penyaji dan diterbitkan sebagai prosiding dengan judul *How Community Perceptions of The Existence Lutung Kelabu Trachypithecus cristatus (Raffles, 1821) as a Tourist Attraction Object in a Small Island? (Case: Pahawang Island, Indonesia)*.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ananda persembahkan kepada ibunda tercinta Hayati dan ayahanda tercinta Amirson Rahimahullah.

Terima kasih telah menjadi penyemangat hidup ananda, memberikan doa serta dukungannya selama ini.

**“Sesungguhnya harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki”
(QS. Al-Qashash:78)**

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengelolaan Pulau Kecil Berbasis Pariwisata: Kasus di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Magister Sains. Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Pascasarjana, Universitas Lampung.
3. Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D. selaku Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Pascasarjana, Universitas Lampung.
4. Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP. selaku Wakil Direktur Bidang Umum, Pascasarjana, Universitas Lampung.
5. Dr. Supono, S.Pi., M.Si. selaku Ketua Prodi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana, Universitas Lampung.
6. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
7. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
8. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
9. Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T. selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
10. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu.

11. Segenap perangkat desa dan masyarakat Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
12. Bapak Suprpto selaku Ketua DPRD Pesawaran.
13. Bapak Ferry Desmawan, S.TP. dan Bapak Basuki Harijanto, S.T. selaku perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pesawaran.
14. Bapak Yudiana, S.Pd., MM. selaku perwakilan dari Dinas Pariwisata Pesawaran.
15. Orang tua penulis yaitu Ayah Amirson Rahimahullah dan Ibunda Hayati yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil hingga penulis dapat menempuh langkah sejauh ini, dan Mas Fajar yang juga memberikan semangat dan dukungan selama ini.
16. Rekan-rekan Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut.
17. Bapak dan Ibu Staff Pascasarjana Universitas Lampung.
18. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022

Putri Wahyuni

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Tujuan	5
C. Kerangka Pemikiran	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Keadaan Umum Daerah Penelitian	7
B. Kebijakan	10
C. Stakeholder	15
D. Pulau Kecil	20
E. Pariwisata di Pulau Kecil	23
III. METODE	28
A. Tempat dan Waktu	28
B. Alat dan Bahan	29
C. Pengumpulan Data	29
D. Analisis Data	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Pola Pemanfaatan Lahan di Pulau Pahawang	38
B. Potensi Wisata di Pulau Pahawang	43
C. <i>Stakeholder</i> Wisata di Pulau Pahawang	61
D. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wisata di Pulau Pahawang	71
V. SIMPULAN DAN SARAN	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Alat dan Bahan yang Digunakan	29
2. Matrikulasi Pengumpulan dan Analisis Data.....	35
3. Identifikasi 4A terkait Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Pulau Pahawang	44
4. Kondisi kelayakan potensi objek wisata di Pulau Pahawang	60
5. Kepentingan dan Pengaruh <i>Stakeholder</i> Wisata di Pulau Pahawang	65
6. Implementor Kebijakan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran.....	6
2. Peta administrasi Pulau Pahawang.....	7
3. Peta lokasi penelitian	28
4. Matriks pengaruh dan kepentingan analisis stakeholder.....	33
5. Proses analisis kebijakan sosial	34
6. Peta kelerengan Pulau Pahawang.....	39
7. Peta pola penggunaan lahan di Pulau Pahawang	40
8. Tambak di Pulau Pahawang.....	42
9. Wisata pantai di Pulau Pahawang	45
10. Wisata mangrove di Pulau Pahawang.....	46
11. Salah satu spot <i>snorkeling</i> di Pulau Pahawang	46
12. Peta sebaran lutung kelabu (<i>Trachypithecus cristatus</i>) di Pulau Pahawang	49
13. <i>Track</i> wisata sepeda di Pulau Pahawang.....	50
14. Gunung keramat dan keindahan landscape di puncak Gunung Keramat, Pulau Pahawang.	51
15. Makam keramat Sekh Kuncung Maulana di Pulau Pahawang	52
16. Bekas penggalian emas oleh oknum tidak bertanggung jawab	53
17. Kondisi jalan di Pulau Pahawang	54

Gambar	viii Halaman
18. Kenampakan salah satu dermaga dan kapal di Pulau Pahawang	55
19. Bentuk fasilitas pelayanan untuk wisatawan (Amenitas).....	56
20. Persentase jumlah kepemilikan dan yang menginap di homestay dan cottage	57
21. Persentase wisatawan yang ingin menikmati potensi wisata baru yang ada di Pulau Pahawang.....	58
22. Tempat wisata dan fasilitas di Pulau Pahawang	59
23. Skema pemetaan peran <i>stakeholder</i> di Pulau Pahawang	63
24. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder wisata di Pulau Pahawang	64
25. Skema implementasi kebijakan pengelolaan pulau kecil berbasis pariwisata	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat izin penelitian	104
2. Surat rekomendasi penelitian	105
3. Kuesioner wisatawan	106
4. Kuesioner stakeholder	108
5. Plagiarsm Checker	111

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau-pulau kecil merupakan pulau yang memiliki ukuran kecil, terpisah dari induk pulau, dan memiliki kesatuan ekosistem di dalamnya. Sutedi *et al* (2017); Syarif *et al.* (2014) mengatakan bahwa pulau-pulau kecil memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Lasabuda (2013) berpendapat bahwa potensi yang dapat dimanfaatkan meliputi potensi wilayah, sumber daya hayati, sumber daya mineral dan energi, potensi industri dan jasa maritim, potensi transportasi laut dan jasa lingkungan, dan potensi kultural. Pada penelitian Mira (2017) mengatakan bahwa pulau kecil juga memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang dapat menjadi prospektif dan subsektor yang berpotensi dan memiliki keunggulan. Selain memiliki potensi dan keunggulan, pariwisata menjadi sumber daya yang sangat berpotensi dalam menambah perekonomian. Teelucksingh *et al.* (2013) mengatakan bahwa wilayah ini juga memiliki kerentanan akan perubahan dari beberapa faktor. Sejalan dengan penelitian Zulrizkan *et al.* (2019) bahwa pulau kecil rentan terhadap dampak perubahan.

Kerentanan akan perubahan di wilayah pulau kecil disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi faktor lingkungan, ekonomi dan sosial (Akbar, 2017). Faktor lingkungan dapat bersumber dari perubahan iklim (Barnett and Waters, 2016; Kastanya, 2016; Kelman, 2018; Walshe, 2018). Selain itu, hal tersebut akan berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Sejalan dengan penelitian (Pelling dan Uitto, 2001; Cherian, 2007) bahwa wilayah ini memang memiliki resiko yang tinggi akan dampak dari perubahan lingkungan. Romadhon (2014)

berpendapat, perubahan lingkungan yang terjadi dapat dilihat bahwa ancaman kerusakan terbesar terjadi pada ekosistem pulau.

Penyebab kerusakan ekosistem pulau meliputi pembukaan wilayah pulau dan alih fungsi lahan (Oprasmani *et al.*, 2020; Cahyadi *et al.*, 2018), pencemaran lingkungan (Jumali *et al.*, 2017), alih fungsi mangrove menjadi tambak (Hartati dan Harudu, 2016; Martuti, 2013; Lumbessy *et al.*, 2015), adanya pariwisata (Widiana dan Wikantiyoso, 2018), aktivitas manusia dari luar (wisatawan) yang datang tanpa adanya batasan masuk ke wilayah tersebut sehingga menjadi salah satu faktor kerusakan (Febrianti *et al.*, 2018). Selain itu PPK menjadi salah satu wilayah yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri (Koroy *et al.*, 2017). Pengelolaan pariwisata yang diduga tidak baik akan membuat kerusakan/krisis ekosistem di sebuah pulau semakin terancam. Rendahnya pengetahuan pelaku wisata terhadap ekosistem dalam melakukan kegiatan wisata berdampak terhadap lingkungan (Khrisnamurti *et al.*, 2017; Muflih *et al.*, 2015).

Dampak lingkungan akibat pariwisata yang dirasakan yaitu pembuangan sampah sembarangan (Laksono dan Mussadun, 2014), sehingga menyebabkan penurunan kualitas perairan laut (Laapo *et al.*, 2009), rusaknya terumbu karang serta terjadi penurunan luas tutupan karang (Jubaedah dan Anas, 2019). Dampak lain juga terjadi seperti tepi pantai yang rusak, hilangnya peruntukan lahan pantai tradisional (Priyanto, 2016), terganggunya vegetasi pantai yang dibuka untuk kebutuhan wisata (Kurniawan *et al.*, 2017), sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan (Nurjanah, 2012). Akibatnya berdampak pada pola pemanfaatan lahan pulau kecil yang mengalami perubahan pada tiap tahunnya. Untuk mencegah hal tersebut sebenarnya tidak lepas dari implementasi kebijakan yang diterapkan di pulau kecil agar pengelolaan pulau berjalan dengan baik (Qodriyatun, 2019).

Aturan kebijakan yang digunakan meliputi Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, serta perubahannya yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Menurut Yurista (2020), peraturan terkait pengelolaaa wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan hal penting dalam penataan dan pemanfaatan fungsi kawasan.

Pola pemanfaatan wilayah sangat diperlukan dalam menyusun pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Kegiatan yang menunjang pada pengelolaan ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yurista dan Wicaksono, 2017). Hal ini termasuk dalam kategori penataan ruang yang mana terdapat pada UU Nomor 26 tahun 2007, UU Nomor 27 tahun 2007 dan PP Nomor 10 tahun 2000 yang menyebutkan penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pigawati, 2012).

Perubahan yang terjadi di wilayah pulau akan sangat mempengaruhi pola tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, seperti pemanfaatan ruang yang ideal dan daerah-daerah mana saja yang potensial untuk mendukung daerah tersebut baik dari segi penempatan kawasan industri, pemanfaatan ruang terbuka hijau dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh semua masyarakat, agar masyarakat mengetahui pemanfaatan daerahnya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan (Adi *et al.*, 2019), khususnya pada daerah pulau kecil. Mardani *et al.* (2018) berpendapat bahwa pulau kecil memiliki potensi yang beragam dan produktif untuk dikembangkan. Sejalan dengan Zaini *et al.* (2020) yang mengatakan pulau kecil sangat berpotensi menjadi daerah pariwisata, sehingga dapat bergerak sebagai penjual jasa lingkungan yang aktif.

Wati *et al.* (2019) mengatakan pulau kecil memang menjadi salah satu industri pariwisata yang memiliki banyak potensi, diantaranya wisata kapal, wisata alam dan ekowisata, wisata pantai dan snorkeling, serta wisata bawah laut. Nurhasanah *et al.* (2017) mengatakan bahwa pulau kecil dapat berkembang menjadi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Menurut Persada *et al.* (2018) keberlanjutan memiliki proses kontinu dalam mengawasi dampak serta implementasi kebijakan terhadap aktivitas pariwisata yang menjadi asas pada keberlanjutan pariwisata. Salah satu pulau kecil yang memiliki potensi pariwisata adalah Pulau Pahawang.

Pulau Pahawang tergolong pulau yang memiliki ukuran kecil (Prakoso *et al.*, 2015). Sejalan dengan penelitian (Wahyuni *et al.* 2020; Afifah *et al.* 2021; Alfatikha *et al.* 2020; Anggara *et al.* 2020) bahwa pulau ini tergolong pulau kecil dengan sumber daya alam yang terbatas. Susanthiasih dan Rusliani (2017) berpendapat bahwa Pulau Pahawang menjadi sektor wisata dengan berbagai objek dan kegiatan wisata yang mendukung. Akan tetapi pariwisata yang ada belum optimal.

Untuk mendukung pariwisata yang optimal, Budianto *et al.* (2013) mengatakan bahwa pada saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan. Peran dan keterlibatan masyarakat, serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga sangat dibutuhkan. Nurdin (2010) berkata bahwa hal tersebut menjadi komponen penting dalam menjaga dan mengelola potensi pulau agar kelestarian dan keberlanjutan tetap terjaga. Untuk membangun pengelolaan pulau kecil berbasis pariwisata dapat berjalan dengan semestinya, sehingga rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pemanfaatan lahan di Pulau Pahawang?
2. Apa saja potensi wisata yang ada di Pulau Pahawang?
3. Siapa saja *stakeholder* dan perannya yang berkaitan dengan wisata di Pulau Pahawang?
4. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan wisata di Pulau Pahawang?

B. Tujuan

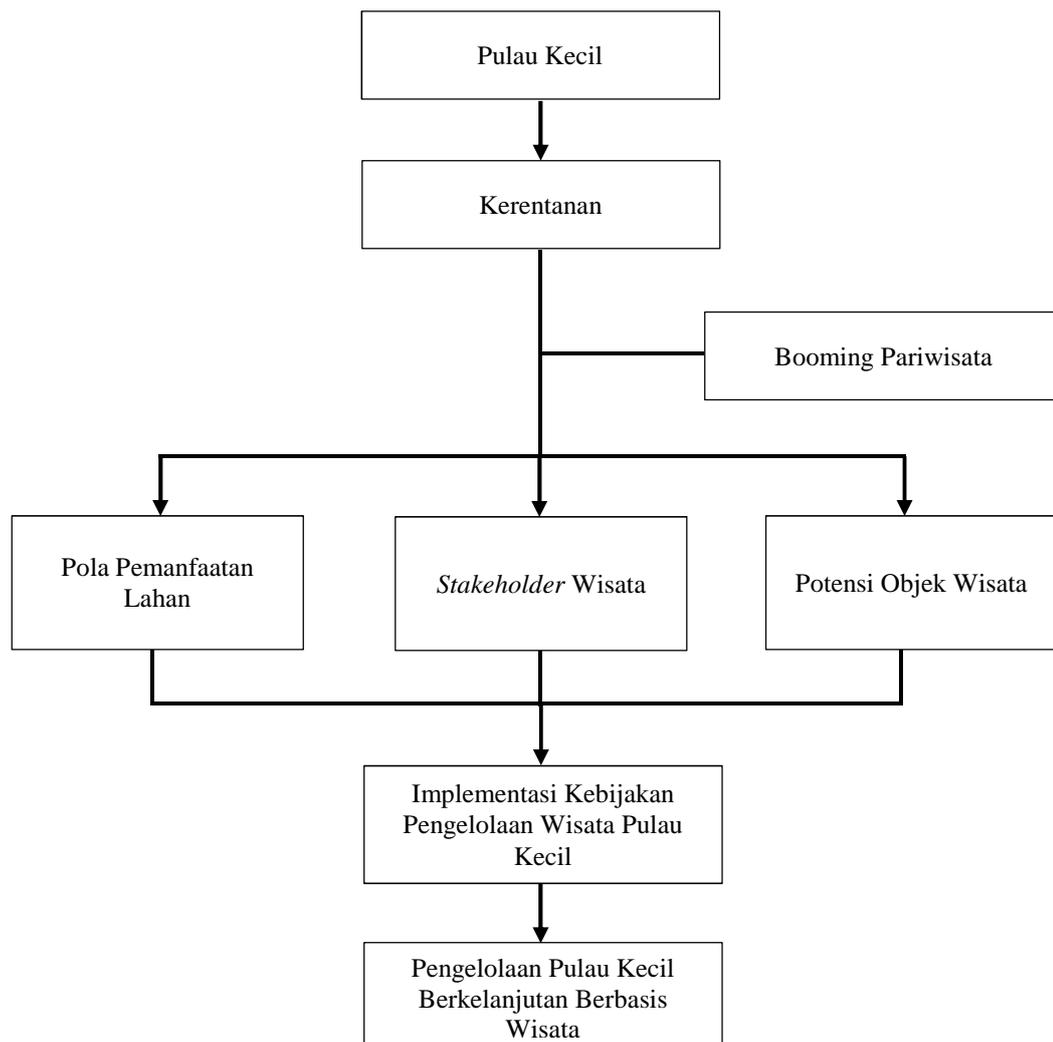
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pola pemanfaatan lahan di Pulau Pahawang.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi wisata yang ada di Pulau Pahawang.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholder* yang berkaitan dengan wisata di Pulau Pahawang.
4. Mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan wisata di Pulau Pahawang.

C. Kerangka Pemikiran

Potensi sumber daya alam di pulau kecil dapat dikatakan terbatas akan tetapi memiliki keanekaragaman di dalamnya. Pulau kecil memiliki perspektif positif dan negatif terhadap sumber daya yang ada. Perspektif positif yang ada adalah keanekaragaman sumber daya alam di pulau kecil dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pulau. Perspektif negatif bahwa pulau kecil rentan terhadap keadaan alam atau kegiatan antropogenik, sehingga kebijakan dan implementasinya diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan pulau kecil.

Kebijakan yang ada apabila implementasinya berjalan dengan baik maka dapat tercermin dari masyarakat yang sadar akan manajemen pengelolaan pulau yang baik. Manajemen pengelolaan pulau kecil dapat dimulai dari memberikan edukasi pada masyarakat dengan bantuan pemerintah setempat hingga *stakeholder* terkait, karena hal ini diperlukan untuk dapat menjaga keberlanjutan pulau kecil dalam menghadapi kerentanan yang ada. Berikut merupakan kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada Gambar 1.

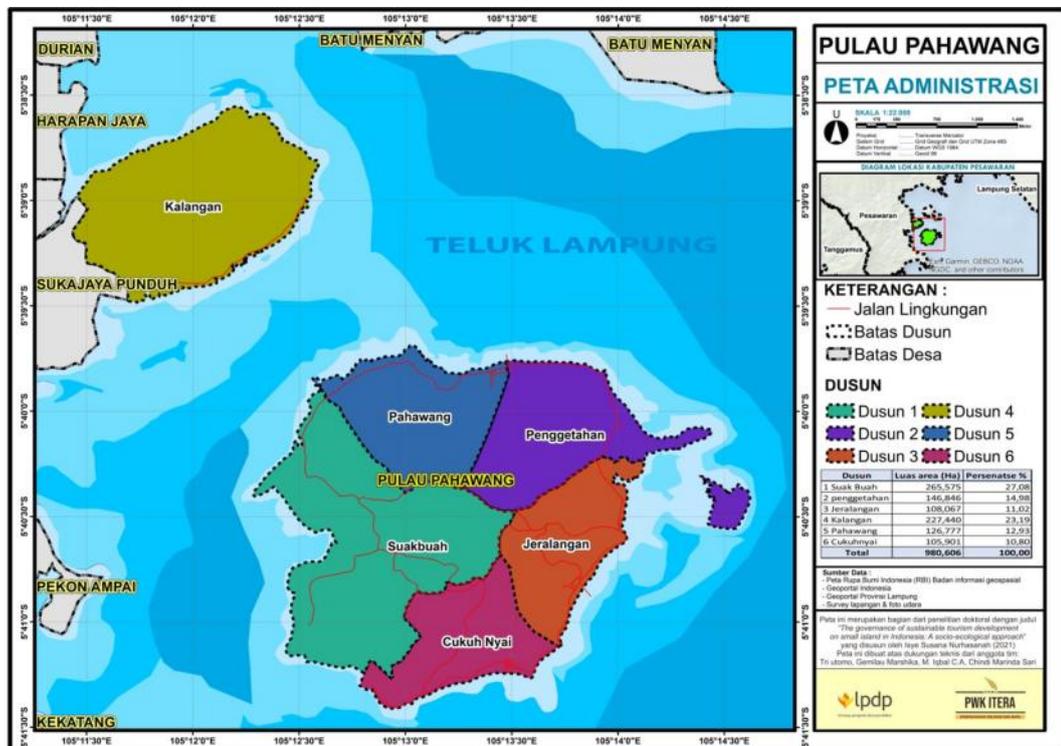


Gambar 1. Kerangka pemikiran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian

Pulau Pahawang adalah salah satu destinasi wisata yang banyak diminati, dan pulau ini berada di daerah Lampung (Al-Khoiriah *et al.*, 2017). Lebih tepatnya berlokasi di Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia (Febryano *et al.*, 2014). Secara administratif desa, Pulau Pahawang dibagi menjadi beberapa enam dusun yaitu Suak Buah, Penggetahan, Jeralangan, Kalangan, Cukuh Nyai, dan Pahawang (Gambar 2).



Gambar 2. Peta administrasi Pulau Pahawang.

Keragaman budaya lokal juga menghiasi pulau kecil yang mana berasal dari Suku Lampung, Sunda dan sebagian kecil lainnya berasal dari Lampung Pesisir, Bugis, Padang dan Jawa atau masyarakat pendatang lainnya (Jainah dan Marpaung, 2017). Jika dilihat dari letaknya secara geografis berdekatan dengan Teluk Punduh Pidada dengan garis $5^{\circ}41'53'' - 5^{\circ}39'02''$ LS dan $105^{\circ}11'44'' - 105^{\circ}14'59''$ BT (Hakim *et al.*, 2018). Pulau ini memiliki ukuran 1.084 ha, dan terbagi menjadi dua yaitu Pahawang Besar dan Pahawang Kecil (Jainah dan Marpaung, 2017). Lokasi pulau yang terletak di Teluk Lampung memiliki daerah yang cukup beragam dan produktif, mulai dari terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), perikanan dan hutan mangrove (Mardani *et al.*, 2018).

Karakteristik tutupan lahan juga diungkapkan oleh (Afifah *et al.*, 2020) bahwa pulau ini terdiri dari hutan mangrove, pemukiman, agroforestri, hutan marga dan tambak. Selain itu pulau ini memiliki potensi bahari yang tinggi (Nurhasanah dan Persada, 2019), serta berpotensi sebagai tempat budidaya rumput laut yang didukung area yang cukup luas dengan ombak yang tidak terlalu besar (Dede *et al.*, 2014). Perikanan di pulau ini juga dikatakan melimpah karena indikator yang terlihat bahwa terumbu karangnya masih dalam keadaan baik (Yuliana dan Rahmasari, 2021). Pulau ini juga memiliki potensi satwa berupa lutung kelabu (Safitri *et al.*, 2020). Keberadaan hutan mangrove juga berperan penting di wilayah ini, terutama untuk jalur hijau atau (*green belt existing*) dan keberadaan dari hutan mangrove dapat menambahkan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) (Mustika *et al.*, 2017). Ekosistem lamun merupakan salah satu habitat yang mendukung kehidupan biota akuatik, yaitu epifauna karena dapat memberi perlindungan dari predator dan juga aktivitas alam seperti arus dan gelombang yang tinggi (Prakoso *et al.*, 2015) yang didukung dengan iklim hujan di Provinsi Lampung memiliki curah hujan diantara 2.264 mm hingga 2.868 mm dengan hari hujan 90–176 hari per tahunnya (Jaenah dan Marpaung, 2017).

Menurut Nurhasanah *et al.* (2017) bahwa Pulau Pahawang dikenal dengan wisata yang pada saat ini sedang dilakukan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan konsep perencanaan wisata yang lebih edukatif. Sama halnya dengan penelitian Davinsy *et al.* (2015) mengatakan bahwa pengelolaan dan strategi

pengembangan pulau kecil perlu diperhatikan dan dikembangkan lebih lanjut, untuk mencapai keberlanjutan. Mardani *et al.* (2018) berpendapat bahwa pulau ini dapat berkembang karena dilihat dari destinasi wisata yang dikunjungi berupa wisata pantai, wisata mangrove maupun wisata *snorkeling*. Wati *et al.* (2019) mengatakan bahwa untuk dapat menyebrangi pulau ini sangat diperlukan fasilitas berupa kapal sebagai akses yang lebih mudah. Fasilitas lain menurut Ma'ariq Badrutamam *et al.* (2020) pulau ini juga sudah memiliki energi listrik yang dipasang di bawah laut sebagai alat penerang masyarakat. Pada penelitian Susanthiasih dan Rusliani (2017) wisata di pulau ini juga sudah didukung fasilitas pendukung lain yang telah disiapkan masyarakat seperti sarana air bersih, kamar mandi, mushola, makanan, serta *homestay*.

Yulianti *et al.* (2013) destinasi wisata yang berada di Pulau Pahawang pada saat ini banyak dikunjungi untuk melakukan kegiatan wisata pantai, wisata mangrove maupun wisata *snorkeling*. Penelitian Nurhasanah *et al.* (2017) mengatakan bahwa kondisi terumbu karang yang terdapat di laut Kabupaten Pesawaran hanya 22,22% (371,79 ha) yang berkondisi baik, 44,44 % (743,5856 ha) berkondisi cukup baik, dan 33,34% (557,69 ha) memiliki kondisi yang sudah rusak. Hal tersebut didukung oleh Mardani *et al.* (2018) bahwa kunjungan wisatawan ke pulau ini yang terus-menerus bertambah dapat menyebabkan rusaknya sumber daya Pulau Pahawang.

Pulau Pahawang menurut Iswandaru *et al.* (2020) dikatakan pulau kecil yang masuk kategori rentan, hal tersebut diakibatkan karena meningkatnya aktivitas pariwisata dan terkait dengan konversi fungsi hutan mangrove menjadi fasilitas pendukung pariwisata. Sejalan dengan Penelitian Anggara *et al.* (2020) bahwa lahan pulau tersebut mengalami konversi pada tiap bagian tutupan lahannya menjadi sarana prasarana wisata yang sangat dikhawatirkan menambah kerentanan pulau. Kesumayuda *et al.* (2020) berpendapat bahwa memang pula ini menjadi salah satu potensi besar yang berpengaruh terhadap wisata. Selain itu Afifah *et al.* (2021) juga mengatakan bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan agroforestri pada tiap tahunnya dengan berbagai aspek kepentingan di dalamnya.

Padahal dalam hal tersebut Alfatikha *et al.* (2020) berpendapat bahwa lahan agroforestri dimanfaatkan sebagai ketahanan pangan untuk penduduk setempat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Selain itu untuk dapat mencegah kerusakan lebih lanjut akibat wisata, disampaikan oleh Apriliawan *et al.* (2020) bahwa program ekowisata dan adanya kesediaan membayar menjadi salah satu program wisata yang baik. Kusnadi dan Sandra (2020) juga mengatakan bahwa pulau ini perlu pengembangan wisata yang mengarah kearah wisata konservasi atau wisata yang bergerak dalam pelestarian alam dan pendidikan berupa ekowisata. Mardiana *et al* (2019) untuk membantu pengelolaan wisata yang baik perlu adanya pokdarwis (kelompok sadar wisata) untuk mengatur program wisata.

B. Kebijakan

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lainnya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick (1963) mendefinisikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus memperlihatkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut pemahaman ahli Pasolong (2008) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip

tertentu. Sejalan dengan hal tersebut Winarno (2002) mengemukakan bahwa istilah “kebijakan” atau “*policy*” secara umum digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Fauzi dan Rostyaningsih (2018) mengatakan bahwa secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dalam artian bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak dalam mengambil keputusan yang mana mengarah pada tujuan-tujuan tertentu. Sejalan dengan Suharto (2008) bahwa kebijakan juga dapat dinyatakan sebagai ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wahab (2002) di dalam bukunya, untuk memahami istilah kebijakan, diberikan beberapa pedoman, meliputi:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pada kebijakan sosial diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian spesifik, yakni menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Beberapa ahli kebijakan yaitu Magill, Marshal, Rein, Huttman, Spicker, dan Hill

mengartikan kebijakan sosial erat kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial.

- Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan public (*public policy*). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, meliputi kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, militer, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan public yang diarahkan pada tujuan-tujuan sosial.
- Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.
- Kebijakan sosial merupakan perencanaan untuk mengatasi biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial.
- Kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
- Kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*), baik dalam arti luas yang menyangkut kualitas hidup manusia, maupun dalam arti sempit yang merujuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat.
- Kebijakan sosial merupakan studi mengenai peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya.

Kata sosial didefinisikan oleh para ahli di atas, merujuk pada manfaat atau bantuan kesejahteraan sosial (*social welfare benefits*). Manfaat dan bantuan kesejahteraan sosial yang tercakup dalam pengertian ini adalah perlindungan sosial (*social protection*) bagi kelompok rentan dan tidak beruntung, jaminan sosial (*social security*) baik yang berbentuk bantuan sosial (*social assistance*) maupun asuransi sosial (*social insurance*), program pemeliharaan penghasilan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, perawatan kesehatan mental, pendidikan dan pelatihan, perawatan dan perlindungan anak, dan pelayanan rekreasi atau wisata.

Produk dari kebijakan sosial adalah hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. Dalam hal ini kebijakan sosial mencakup perumusan

kebijakan atau penyusunan kebijakan, segala bentuk aturan, perundang undangan atau proposal program yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau proyek. Dalam hal ini peraturan atau perundang undangan adalah sebuah kebijakan, namun tidak semua kebijakan adalah peraturan atau perundang undangan. Prasetyo (2012) mengatakan bahwa dalam penyusunan kebijakan yang berkarakter dilakukan proses menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu dengan indikator keterlibatan seluruh *stakeholder* yang relevan.

Substansi kebijakan pada hakekatnya adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu “isu” (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri (Tachjan, 2008). Dari pemahaman-pemahaman yang ada kebijakan tidak lain adalah sebuah tujuan yang diimplementasikan (Herdiana, 2018).

Implementasi kebijaksanaan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijaksanaan (Wahab, 2002). Berdasarkan definisi implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan dapat diterima masyarakat dan tidak merugikan salah satu pihak. Kebijakan memiliki proses yang dikelompokkan menjadi tiga fungsi meliputi perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengawasan dan evaluasi (hasil) kebijakan publik. Ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi pokok (dasar) administrasi publik (Tachjan, 2006). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai

alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Salah satu yang ada yaitu kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam mencakup aspek penguasaan dan pemanfaatannya, terutama terkait aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektor-sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi dan lain sebagainya. Penguasaan dan pemanfaatan sektor-sektor tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan (ekonomi) seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Pada konsep pembangunan dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan pemanfaatan sumber daya alam (Rosana, 2018). Pemanfaatan sumber daya alam biasanya memiliki klaim terhadap kepemilikan baik pihak pemerintah, masyarakat, maupun *stakeholder* (Lahandu *et al.*, 2007). Sejatinnya, permasalahan tersebut telah diupayakan solusinya dengan keluarnya Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam (Nurlinda, 2017). Pengelolaan sumber daya melihat aktor dan relasi kekuasaan dalam menjalankan sistem pengelolaannya (Febryano, 2015). Selain itu pada program pengelolaan sumber daya masyarakat juga diberi akses dalam hal ini (Febryano *et al.*, 2017). Ketika masyarakat melakukan tindakan kolektif terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat membuahkan hasil, akan tetapi kelembagaan lokal juga perlu diperhatikan (Febryano *et al.*, 2014). Pada pengelolaan masyarakat merupakan garda terdepan dalam pelestarian sumber daya (Alfandi *et al.*, 2019). Kajian kelembagaan pada pengelolaan sumber daya juga diperlukan dalam pengelolaan sumber daya (Elva *et al.*, 2017; Buli *et al.*, 2018; Aminah *et al.*, 2017; Larasati *et al.*, 2021; Apriandana *et al.*, 2021). Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah sangat membutuhkan peran kelembagaan lokal untuk mencapai keberhasilan (Wulandari *et al.*, 2018). Salah satu sumber daya alam yang penting dan dilindungi di wilayah pulau kecil dengan kebijakan yaitu pariwisata.

Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan kebijakan tersendiri dalam pengembangan pariwisata di pulau kecil, yaitu melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau Pulau Kecil. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kondisi daya dukung pulau kecil yang terbatas. Seperti disebutkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (yang sudah diperbaharui dengan UU Nomor 1 Tahun 2014) bahwa pulau kecil itu memiliki karakteristik, meliputi:

- a. Terpisah dari pulau besar
- b. Sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan manusia
- c. Memiliki keterbatasan daya dukung pulau
- d. Apabila berpenghuni penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang khas
- e. Memiliki ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik induk maupun kontinen

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik atau sebagai proses kegiatan yang bertalian dengan penerapan organisasi dan manajemen di dalam suatu unit administratif dalam rangka merealisasikan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

C. Stakeholder

Stakeholder didefinisikan sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan (Freemen *et al.*, 2020). Pengertian lain juga menyebutkan bahwa *stakeholder* adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan (Pramono dan Kinasih, 2019). Pengertian lain mengatakan bahwa selain individu yang dianggap sebagai stakeholder, kelompok maupun institusi yang memiliki pengaruh terhadap usulan kebijakan atau hasil kebijakan baik itu berdampak negatif maupun positif bagi sebagian pihak termasuk bagian dari stakeholder.

Proses analisis setiap stakeholder diperlukan untuk mengetahui setiap peran masing-masing semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu kebijakan, keputusan maupun tindakan dari suatu program yang dilaksanakan (Pangaribuan dan Munandar, 2021).

Secara umum *stakeholder* dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal adalah *public* yang berada didalam ruang lingkup perusahaan/organisasi. *Stakeholder* internal relative mudah untuk dikendalikan dan pekerjaan untuk komunikasi intern bias diserahkan kepada bagian lain seperti bagian kepegawaian, atau dirangkap langsung oleh eksekutif puncak, yang mana unsur-unsur *stakeholder* internal terdiri dari:

- a. Pemegang saham; pemilik perusahaan yang mempunyai kekuasaan sangat besar.
- b. Manajer dan Top Executive; manajer berada dibawah kendali pemilik, hanya dengan kapasitas yang memadai seorang manajer dapat tampil secara otonom dalam mengelolah perusahaan.
- c. Karyawan; orang-orang yang di dlam perusahaan yang tidak memegang jabatan structural.
- d. Keluarga karyawan.

Stakeholder eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, dan berada diluar perusahaan, misalnya:

1. Konsumen

Raja yang mempunyai hak untuk memilih barangnya sendiri konsumen sangat diperebutkan oleh banyak produsen.

2. Pemerintah

Penentu kebijakan, sedikit sekali produsen yang bias membujuk pemerintah untuk mengeluarkan peraturrn yang menguntungkan baginya.

3. Penyalur

Orang yang menyalurkan barang-barang yang dikehendaki konsumen.

4. Pers

Media yang mana sangat berpengaruh pada masyarakat.

5. Komunitas

Masyarakat yang tinggal, hidup, dan berusaha di sekitar lokasi suatu perusahaan/yang memegang peran penting.

Istilah dari pemangku kepentingan atau *stakeholder* oleh Demir *et al.* (2015) adalah langkah dari kegiatan yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memetakan dan kemudian mengelola sumber daya yang berpotensi, yang mana memiliki pengaruh terhadap kemajuan dari usaha yang akan dikelola. Oleh karena itu, analisis pemangku kepentingan menjadi sebuah proses yang jelas dalam kelompok yang memiliki kaitannya dengan pengelolaan sumber daya. Maka dari itu menyarankan bahwa terdapat tiga langkah untuk analisis pemangku kepentingan, yaitu:

1. Mengidentifikasi *stakeholder*
2. Memprioritaskan *stakeholder*
3. Memahami *stakeholder* kunci

Langkah pertama merupakan langkah yang sangat penting dalam manajemen proyek. Identifikasi *stakeholder* merupakan kunci dalam mengetahui informasi yang rinci mengenai tujuan dari pemangku kepentingan. Untuk memprioritaskan pemangku kepentingan adalah ditujukan agar dalam pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan baik dan bertujuan akan berhasil. Memahami *stakeholder* kunci adalah upaya dalam pengambilan keputusan akan dilakukan dengan baik, kemudian bertanggung jawab, serta pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut merupakan salah satu model dalam menentukan klasifikasi *stakeholder*, yaitu:

- power/interest
- power/influence
- influence/impact
- power/urgency

Menurut Latupapua (2015) mengatakan bahwa *stakeholders* dibagi menjadi tiga kelompok, meliputi:

a. *Stakeholders* primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai *stakeholder* primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

b. *Stakeholders* kunci

Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini *stakeholders* kunci adalah *stakeholders* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.

c. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholders pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Dalam hal ini menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. *Stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Menurut Nugroho *et al.* (2011) pada pelaksanaan pengembangan *stakeholder* diklasifikasikan menjadi tiga yang meliputi *stakeholder* berdasarkan kepentingan, berdasarkan tipologi, dan berdasarkan peran *stakeholder*. Reed *et al.* (2009) mengatakan bahwa tahap yang dilakukan untuk menganalisis *stakeholder*, meliputi:

a. Subyek (*Subjects*).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.

b. Pemain Kunci (*Key Players*).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.

c. Pengikut Lain (*Crowd*).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.

d. Pendukung (*Contest setters*).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Untuk penentuan analisis *stakeholder* oleh Jepsen dan Eskerod (2009) bahwa pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan perlu berinteraksi dengan masyarakat sekitar sumber daya. Berikut merupakan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam analisis *stakeholder* meliputi:

1. Identifikasi pemangku kepentingan
2. Karakteristik *stakeholder*, yaitu:
 - a. Kontribusi yang dibutuhkan
 - b. Harapan keberhasilan dari kontribusi yang dilakukan
 - c. Kekuatan dari kekuasaan yang berkaitan dengan kegiatan.
3. Keputusan tentang strategi mana yang digunakan untuk mempengaruhi masing-masing pemangku kepentingan.

Peran *stakeholder* memang memiliki beberapa perbedaan yang mana perbedaan tersebut tidak jauh dari tujuan yang dibuat dari penciptaan *stakeholder*. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing anggota *stakeholder*, yang mana menurut Mahfud *et al* (2015) terdapat lima kategori *stakeholder* berdasarkan perannya, meliputi:

a. Policy creator

Policy creator adalah stakeholder yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan.

b. Koordinator

Koordinator diartikan sebagai stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.

c. Fasilitator Fasilitator

stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

d. Implementer

Implementer merupakan stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran dari pengembangan kawasan.

e. Akselerator Akselerator

Akselerator Akselerator merupakan stakeholder yang berperan mempercepat atau memberikan kontribusi agar program minapolitan dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

D. Pulau Kecil

Pulau Pulau Kecil (PPK) dapat didefinisikan dengan luasan yang kecil dan memiliki keterbatasan sumber daya. Definisi Pulau Pulau Kecil menurut Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Secara nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67 tahun 2002, pulau kecil adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Polyakov (2012) mengatakan bahwa pulau memiliki kategori ukuran mulai dari pulau besar, pulau kecil, dan sangat kecil. Onat *et al.* (2018) masyarakat pulau sangat bergantung terhadap aset sebagai peluang sosial untuk hidupnya. Tahir *et al.* (2009) akan tetapi wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan. Mwelusepo *et al.* (2016) mulai dari perubahan penggunaan lahan atau tutupan lahan yang serta merta mengganggu ekosistem pulau. Michalena *et al.* (2017) kerusakan terjadi biasanya terdapat dari faktor alam seperti perubahan iklim maupun manusia, yang mana mengganggu karakteristik pulau kecil.

Definisi yang paling banyak tersedia tentang pulau cenderung kepada ukuran pulau, mulai dari pulau yang hanya beberapa meter persegi sampai jutaan kilometer persegi. Berdasarkan ukurannya, pulau dapat dibedakan menjadi pulau besar, pulau kecil dan pulau sangat kecil (Polyakov *et al.*, 2012). Ada beberapa batasan yang digunakan dalam mendefinisikan pulau kecil. Pulau Pulau Kecil Terluar selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal kepulauan

sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran serta strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kaitan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, menurut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 tahun 2008 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya disebutkan bahwa pulau dengan luas areanya 2.000 km² kegiatan yang sesuai mencakup konservasi sumber daya alam, budi daya laut, pariwisata bahari, usaha penangkapan ikan berkelanjutan, pendidikan dan penelitian, dan sebagainya. Huong *et al.* (2018) menyatakan bahwa strategi pengelolaan pulau kecil harus dapat mengaitkan seluruh kegiatan dan pemangku kepentingan yang ada di pulau kecil dengan sistem yang terkoordinasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem terkoordinasi yang dapat diidentifikasi di pulau kecil paling tidak terdapat lima proses, yaitu proses alam, proses sosial, proses ekonomi, proses perubahan iklim, dan proses pertemuan antara daratan dan laut yang masing-masing merupakan komponen dalam sistem pulau kecil yang tidak bisa dipisahkan antara sistem lingkungan daratan, sistem lingkungan laut, dan sistem aktivitas. Menurut Hidayah *et al.* (2016) jika pengelolaan pembangunan pada kawasan pesisir tidak terencana dengan baik, maka dapat mengakibatkan dampak yang besar. Prediksi penggunaan lahan di masa yang akan datang sangat membantu dalam perencanaan untuk pengelolaan lingkungan di perkotaan maupun pesisir (Kumar *et al.*, 2015).

Pulau kecil memiliki karakteristik seperti secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Adanya *catchment area* dan potensi sumber daya air di pulau kecil biasanya ditentukan oleh letak wilayah, morfologi, iklim, jenis tutupan lahan dan posisi geografi dan tatanan iklim regional (Hehanussa dan Hartanto 2005), singkatnya tidak dapat terlepas dari kondisi hidrogeologi pulau (Suriadarma dan Delinom 2005). Falkland (1993) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber air tawar, baik air tanah dan air permukaan adalah:

1. Fisiografi,
2. Iklim dan hidrologi,
3. Geologi dan hidrogeologi,
4. Tanah dan vegetasi, dan
5. Pengaruh manusia, termasuk abstraksi (pompa atau penyedotan air) dan polusi dari berbagai sumber.

Low islands dan *low-lying areas of high islands* juga merupakan faktor penting yang dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut (Falkland, 1993). Beberapa pulau kecil memiliki ciri-ciri sistem hidrogeologi yang khas (Delinom dan Lubis 2007), yang meliputi:

1. Air tanah seluruhnya berasal dari air hujan dengan siklus antara resapan air ke dalam tanah dan pemanfaatannya relatif pendek.
2. Air tanah di pulau kecil kebanyakan berupa lensa yang mengapung di atas air payau atau air asin.
3. Terjadinya larian permukaan (*run off*) pada waktu hujan kecil, namun air yang meresap ke dalam tanah sebagian besar berdifusi dengan air laut di bawah.

Pulau kecil yang baik memiliki kualitas air yang baik di sekitar ekosistem mangrove (Schaduw, 2018).

Pulau kecil selain memiliki sifat khas juga memiliki macam-macam potensi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pulau (Pigawati, 2005). Secara umum, sumber daya alam di kawasan pulau kecil terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih (*renewable resources*), sumber daya yang tidak dapat pulih (*non renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan (*environmental service*). Jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan adalah pariwisata, sumber daya tidak dapat pulih

meliputi minyak bumi dan gas, biji besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainnya. Sejalan dengan Mira (2017) bahwa selain itu wilayah ini juga memiliki potensi perikanan dan potensi pariwisata. Lasabuda (2013) mengatakan sumber daya dapat pulih, terdiri berbagai ikan, plankton, benthos, molusca, mamalia laut, rumput laut (*seaweeds*), lamun (*seagrass*), terumbu karang, krustasea, dan mangrove.

Sumber daya dapat pulih seperti mangrove, menurut Wilson (2017) bahwa perubahan mangrove yang terjadi sangat berakibat terhadap beberapa habitat yang berada di pulau kecil. Suyadi dan Manullang (2020) mengatakan bahwa kerusakan mangrove salah satunya adalah sampah plastik. Utami *et al.* (2017) berpendapat mangrove di pulau kecil regenerasi keberlanjutannya sangat dibutuhkan untuk mempertahankan pulau dari kerentanannya. Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang multi fungsi yang menyediakan sumber daya dan unik dibandingkan dengan formasi hutan lain (Hanum *et al.*, 2019; Masithah *et al.*, 2016). Pohon mangrove tumbuh pada perairan payau yang akarnya muncul sebagian dan membentuk filter yang efektif untuk melemahkan gelombang air laut dan tempat tinggal biota laut yang ada disana, selain itu akar mangrove dapat menjebak sampah yang terbawa ombak laut yang mana itu memudahkan pembersihan pantai (Martin *et al.*, 2019). Hutan mangrove juga bermanfaat untuk mengurangi karbon dioksida (CO₂) di atmosfer (Pham *et al.*, 2019) dan sejumlah besar karbon tersebut diakumulasi dan disimpan untuk waktu yang lama (Bindu *et al.*, 2017).

E. Pariwisata di Pulau Kecil

Pariwisata adalah fenomena yang sangat kompleks dan dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan mengadopsi pendekatan multidisiplin. Pariwisata juga dapat dikatakan sebagai kekuatan dan institusi sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan banyak yang terkait dengan industri secara langsung atau tidak langsung. Sejalan dengan itu, pariwisata juga menyebabkan beberapa perubahan dan transformasi pada berbagai subjek (seperti interaksi lintas budaya,

aksesibilitas, kontribusi terhadap lingkungan, dan lainnya). Jika dilihat dari definisinya pariwisata adalah sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain (Godovykh dan Tasci, 2020).

Pariwisata menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2010 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, dan pantai.
3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, dan informasi pariwisata). Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Salah satu potensi yang kini banyak dikembangkan dan digali banyak negara adalah pariwisata. Pada saat ini kecenderungan pasar pariwisata internasional untuk berwisata mengalami peningkatan pada kawasan yang masih alami (Qodriyatun, 2019). Kegiatan pariwisata di sebuah pulau memberikan bentuk wisata yang berbeda dengan wisata di daerah daratan pada umumnya, hal ini disebabkan kondisi geografis kepulauan memiliki ciri yang khas (Razak dan Suprihardjo, 2013). Ciri khas tersebut tergolong dalam potensi yang mana dapat diambil keindahan dan keaslian lingkungannya sebagai wisata seperti *diving*, *snorkeling*, *surfing*, *fishing*, dan lainnya (Koroy *et al.*, 2017). Hal-hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan pariwisata sebagai peningkatan ekonomi masyarakat pulau (Spalding *et al.*, 2017). Dari segi ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung (Hutasoit, 2017).

Pariwisata dibagi menjadi beberapa lima aspek, yaitu:

- a. Aspek lokasi industri pariwisata
- b. Aspek sifat khusus dari pariwisata
- c. Aspek penawaran pariwisata
- d. Aspek permintaan industri pariwisata
- e. Aspek pasar industri pariwisata

Kegiatan pariwisata juga tidak luput dari keuntungan dan kerugian. Hal tersebut ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat keuntungan dan kerugiannya yang ditimbulkan oleh pariwisata, yaitu:

1. Keuntungan pariwisata dipengaruhi oleh:
 - a. Membuka kesempatan kerja
 - b. Menambah pemasukan atau pendapatan masyarakat daerah
 - c. Menambah devisa negara
 - d. Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli
 - e. Menunjang gerak pembangunan daerah.
2. Kerugian pariwisata meliputi:
 - a. Pariwisata dapat merusak lingkungan
 - b. Pencurian benda-benda kuno atau bersejarah
 - c. Berubahnya tujuan kesenian atau upacara tradisional
 - d. Merosotnya mutu barang kerajinan
 - e. Timbulnya industri seks (Tanjung, 2011).

Menurut Karyono (1997) perjalanan yang dilakukan wisatawan dapat dibedakan berdasarkan sifat perjalanannya, yaitu:

- a. *Foreign Tourist* (Wisatawan Mancanegara)

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana bisa tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara.

b. *Domestic Foreign Tourist*

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal disuatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisatawan di wilayah negara di mana ia tinggal. Misalnya, staf kedutaan Australia yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke Australia, tetapi melakukan kegiatan wisata dia Indonesia (tempat ia bertugas).

c. *Domestic Tourist* (Wisatawan Nusantara)

Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya, warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali.

d. *Indigenous Foreign Tourist*

Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga negara Indonesia yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Australia, ketika liburan ia kembali ke Indonesia dan melakukan perjalanan wisata. Jenis wisata ini merupakan kebalikan dari *Domestic Foreign Tourist*.

e. *Transit Tourist*

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.

f. *Business Tourist*

Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan yang utama telah selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.

Objek daya tarik wisata dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman sumber daya alam. Selain itu, juga dapat dilihat budaya masyarakat dan wisata buatan manusia yang dapat dijadikan tujuan sebagai kunjungan oleh wisatawan. Jenis-jenis objek daya tarik wisata dibedakan menjadi tiga oleh Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, yaitu:

1. Objek daya tarik wisata yang berkaitan dengan wisata alam
2. Objek daya tarik wisata yang berkaitan dengan budaya masyarakat local
3. Objek daya tarik wisata yang berkaitan dengan buatan manusia

Tercapainya keberhasilan objek daya tarik wisata biasanya dapat diukur menggunakan 4A, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary service.

- a. Atraksi adalah kegiatan wisata yang disiapkan dengan baik, dapat dilihat, dan dapat dinikmati oleh wisatawan.
- b. Aksesibilitas adalah alat transportasi atau prasarana lain seperti jalan, jembatan, dermaga, terminal, stasiun, bandara, dan lainnya yang dapat digunakan pada saat kegiatan wisata.
- c. Amenitas adalah fasilitas wisata yang mendukung seperti akomodasi, penginapan, tempat makan, air bersih, komunikasi, keamanan, dan lainnya yang mendukung.
- d. Ancillary service adalah layanan atau fasilitas tambahan pendukung kegiatan wisata, seperti pusat informasi, organisasi wisata, dan lainnya.

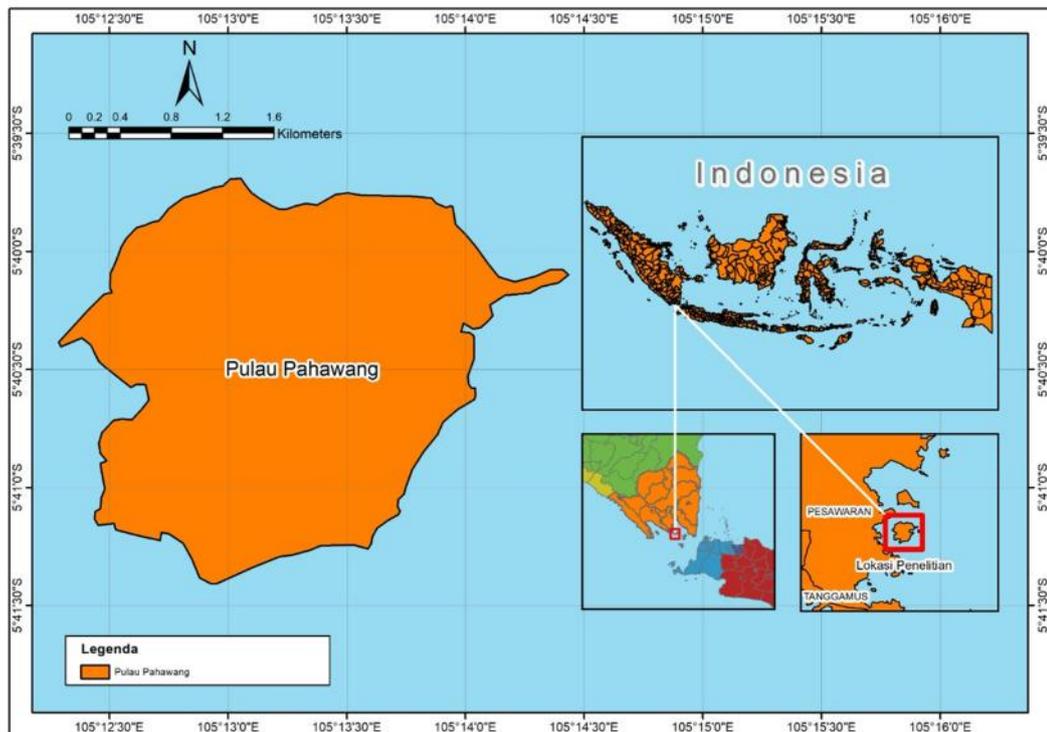
Ketika wisatawan mengetahui bagaimana kondisi dari objek daya tarik wisata yang ada, dapat memungkinkan untuk ketertarikan wisatawan melakukan kegiatan wisata. Biasanya kedatangan wisatawan juga dapat ditandai dengan keunikan dari lokasi wisata. Secara umum dalam pengembangan minat khusus potensi objek daya tarik wisata dapat berupa diantaranya yaitu:

- a. Aspek alam yaitu flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hutan alam atau taman nasional, dan kelautan. Atraksi tersebut kemudian dikemas dalam bentuk wisata, yang mana akan masuk kategori atraksi wisata.
- b. Wisatawan akan terlihat fisik, mental, dan emosional terhadap objek wisata yang didatangi. Objek daya tarik wisata budaya juga dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Objek wisata ini biasanya akan melihat atau mempelajari budaya masyarakat lokal.
- c. Objek wisata buatan, biasanya dapat berupa petualangan atau wisata sepeda. Biasanya wisata tersebut menyangkut pada bentang alam atau *landscape*.

III. METODE

A. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan selama enam bulan, pada bulan oktober sampai dengan februari 2022. Lokasi penelitian berada di Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta lokasi penelitian.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat dan Bahan yang Digunakan

No	Alat dan Bahan	Kegunaan
1.	Alat tulis dan buku tulis	Untuk mencatat hasil pengamatan lapang
2.	GPS (<i>global positioning system</i>)	Untuk menitik pola pemanfaatan lahan di Pulau Pahawang
3.	Software ArcGIS	Sebagai media tranformasi marking point ke dalam peta dasar
4.	Kamera Digital	Dokumentasi penelitian
5.	Kuesioner (Panduan Wawancara)	Pengambilan data wawancara
6.	Perekam Suara	Merekam percakapan pada saat wawancara

C. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian mengenai strategi pengelolaan pulau kecil di Pulau Pahawang meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di Pulau Pahawang guna melihat pola pemanfaatan lahannya (agroforestri, mangrove, pemukiman, tambak, dan hutan yang dilindungi masyarakat) kemudian melihat potensi wisata yang ada, dan mengidentifikasi *stakeholder* terkait.

2. Wawancara

a. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik *purposive sampling* kepada informan kunci, meliputi *stakeholder* terkait seperti Pemerintah Desa, tokoh adat, Bumdes, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Ketua DPRD Pesawaran, Dinas Pariwisata, Pengelola Wisata atau POKDARWIS, dan *travel*

agent. Wawancara ditujukan untuk melihat implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap Pulau Pahawang.

b. Wawancara Tertutup

Wawancara dilakukan menggunakan panduan kuesioner. Responden yang diambil adalah wisatawan. Sampel responden wisatawan diambil secara *insidental sampling* dengan batasan umur 17 tahun.

3. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian (Danial dan Warsiah, 2009). Studi literatur ini mengacu pada penelitian terdahulu seperti jurnal, buku, berita terkait Pulau Pahawang, data administratif desa, Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah terkait Pulau Kecil.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. GIS (*Geographic Information System*).

a. Sumber Data Data Spasial (primer).

Sumber data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah bersumber dari aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografi yaitu ArcGIS 10.6, aplikasi ini akan melihat pola tata ruang wilayah yang ada sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah seperti RZWP3K, dari hasil persebaran tersebut akan dibuktikan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan.

b. Data Atribut (sekunder).

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber lain seperti Peraturan pemerintah, Bappeda, buku, jurnal ataupun artikel.

c. Pengolahan Data Spasial.

Pada koordinat tertentu pada area citra dengan menggunakan polygon batas administrasi. Melakukan klasifikasi penggunaan lahan melalui *Google Earth*, seperti:



a) Agroforestri dan Hutan



b) Pemukiman dan Hutan Mangrove



c) Tambak

- d. Melakukan *object based image analysis*
- e. Melakukan *object oriented classification*
- f. Menggunakan citra sentinel 2

g. *Ground Check* (Pemeriksaan Lapangan) untuk melihat kembali hasil interpretasi objek.

h. Pengolahan Data Atribut

Pengolahan data atribut dimaksudkan agar data yang sudah terkumpul memberikan gambaran mengenai pola ruang yang ada di lapangan. Pengolahan data atribut ini melalui survei lapangan berdasarkan titik *ground check* yang telah dibuat, wawancara, observasi terhadap kondisi di lapangan dan dokumentasi.

2. Analisis 4 A

Analisis (4A) merupakan analisis terkait Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan menggunakan empat komponen yang meliputi:

A1 (*Attraction* atau Atraksi):

Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan wisata apa saja yang dapat disiapkan dengan baik, dapat dilihat, dan dapat dinikmati oleh wisatawan.

A2 (*Accessibility* atau Aksesibilitas):

Mengidentifikasi dan menganalisis terkait alat transportasi atau prasarana lain seperti jalan, jembatan, dermaga, terminal, stasiun, bandara, dan lainnya yang dapat digunakan pada saat kegiatan wisata.

A3 (*Amenity* atau Amenitas):

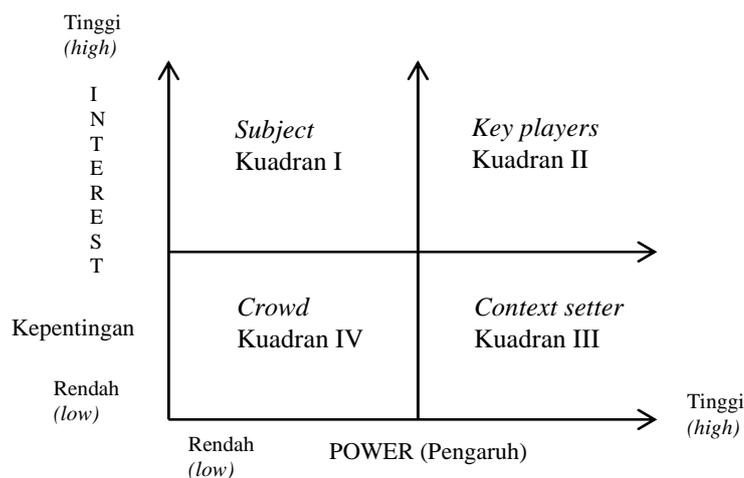
Mengidentifikasi dan menganalisis fasilitas wisata yang mendukung seperti akomodasi, penginapan, tempat makan, air bersih, komunikasi, keamanan, dan lainnya yang mendukung.

A4 (*Ancillary* atau Fasilitas tambahan):

Mengidentifikasi dan menganalisis fasilitas tambahan pendukung kegiatan wisata, seperti pusat informasi, organisasi wisata, dan lainnya.

3. Analisis *Stakeholder*

Analisis *stakeholder* yang digunakan adalah menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan (Reed *et al.*, 2009) (Gambar 4).



Gambar 4. Matriks pengaruh dan kepentingan analisis *stakeholder*.

Tahapan yang dilakukan pada analisis *stakeholder* yaitu melihat matriks langkah-langkah pengaruh dan kepentingan yang diklasifikasikan menjadi empat, meliputi:

a. Subyek (*Subjects*).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.

b. Pemain Kunci (*Key Players*).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.

c. Pengikut Lain (*Crowd*).

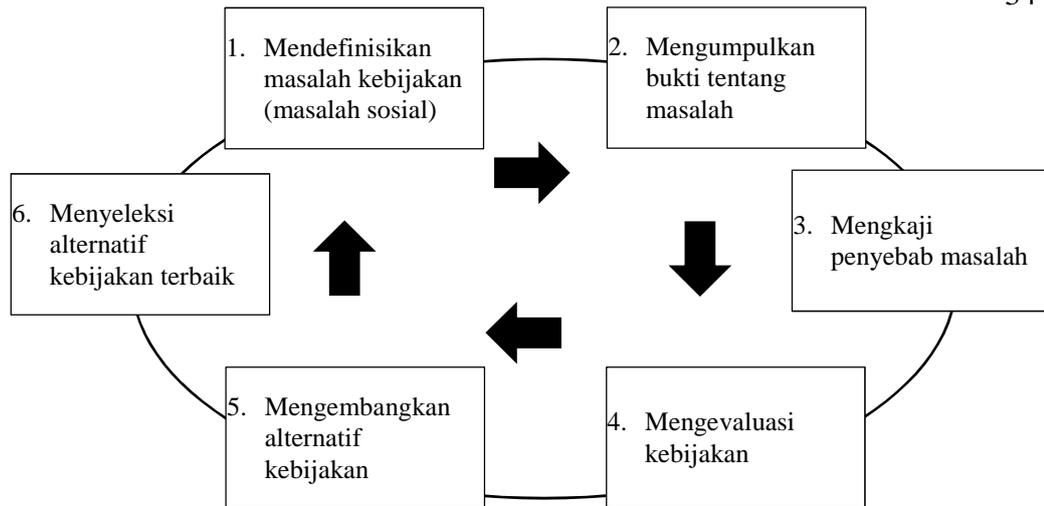
Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.

d. Pendukung (*Context setter*).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

4. Analisis Implementasi Kebijakan

Proses analisis kebijakan yang dilakukan (Gambar 5), merujuk pada kegiatan yang mengeksplorasi isu-isu atau masalah sosial yang terjadi di Pulau Pahawang, kemudian fokus terhadap masalah dan analisis kebijakannya.



Sumber: (Suharto, 2008)

Gambar 5. Proses analisis kebijakan sosial.

Tabel 2. Matrikulasi Pengumpulan dan Analisis Data

No	Tujuan	Variabel Yang Diamati	Pengumpulan Data	Analisis Data	Responden
1.	Mengidentifikasi pola pemanfaatan lahan di Pulau Pahawang.	Pola pemanfaatan lahan: <ul style="list-style-type: none"> - Agroforestri - Mangrove - Hutan Marga - Tambak - Pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi literatur - Observasi 	GIS (<i>Geographic Information System</i>)	-
2.	Mengidentifikasi potensi wisata yang ada di Pulau Pahawang.	Objek Daya Tarik Wisata: <ul style="list-style-type: none"> - Atraksi - Aksesibilitas - Amenitas - Fasilitas tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi literatur - Observasi - Wawancara 	Analisis 4A: <i>(Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary)</i>	- Wisatawan
3	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang berkaitan dengan wisata di Pulau Pahawang.	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pemerintah Desa Pulau Pahawang - Ketua DPRD Pesawaran - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) - Dinas Pariwisata (DISPAR), dan - Pengelola Wisata atau POKDARWIS 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi literatur - Observasi - Wawancara 	Analisis <i>stakeholder</i> sederhana	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pemerintah Desa Pulau Pahawang - Ketua DPRD Pesawaran - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) - Dinas Pariwisata (DISPAR), dan - Pengelola Wisata atau POKDARWIS

Tabel 2. (Lanjutan)

No	Tujuan	Variabel Yang Diamati	Pengumpulan Data	Analisis Data	Responden
4.	Mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan wisata di Pulau Pahawang.	<p>Implementasi kebijakan dari peraturan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil - UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - PERPRES No. 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - UU Cipta Kerja - Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi literatur - Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Implementasi Kebijakan (Buku: Suharto, 2008) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pemerintah Desa Pulau Pahawang - Ketua DPRD Pesawaran - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) - Dinas Pariwisata (DISPAR), dan - Pengelola Wisata atau POKDARWIS

Tabel 2. (Lanjutan)

No	Tujuan	Variabel Yang Diamati	Pengumpulan Data	Analisis Data	Responden
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten 			

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pola pemanfaatan lahan yang ada di Pulau Pahawang diklasifikasikan menjadi lima, yaitu agroforestri, hutan mangrove, tambak, pemukiman dan hutan yang dilindungi oleh masyarakat. Luas lahan agroforestri mencapai 552,4 ha, luas lahan mangrove mencapai 66,49 ha yang meliputi zona pemanfaatan, zona penyangga, dan zona inti, kemudian untuk luas tambak mencapai 54,10 ha, luas pemukiman masyarakat sebesar 66,49 ha, dan luas hutan yang dilindungi masyarakat sebesar 6 ha dari yang teridentifikasi oleh digitasi peta sebesar 10,50 ha.

Potensi wisata yang ada di Pulau Pahawang terdiri dari tujuh destinasi yang meliputi wisata pantai, wisata mangrove, wisata bawah laut (*snorkeling*), wisata minat khusus lutung, wisata sepeda (keliling pulau), wisata pendakian, dan wisata religi. Masing-masing destinasi wisata memiliki daya tarik tersendiri, disamping itu dapat menikmati keindahan *landscape* yang ada.

Stakeholder yang berkaitan dengan wisata di Pulau Pahawang digolongkan menjadi dua yaitu *stakeholder* yang berasal dari pulau dan *stakeholder* yang berasal dari luar pulau. Adapun *stakeholder* yang berasal dari pulau meliputi masyarakat, tokoh masyarakat/tokoh adat, pemerintah desa, bumdes, dan pokdarwis. *Stakeholder* dari luar pulau meliputi DPRD Pesawaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Pesawaran), Dinas Pariwisata Pesawaran, dan *travel agent*.

Implementasi kebijakan di Pulau Pahawang pada dasarnya perlu diperhatikan kembali. Tata ruang wilayah di pulau ini sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan, dan pemerintah desa sadar akan hal tersebut. Kegiatan wisata yang ada di lokasi ini sebenarnya belum ada peraturan desa yang disahkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi aturan tertulis dari desa tetap digunakan guna menjalankan kegiatan wisata dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa masukan atau saran yang diharapkan dapat membantu, yaitu terkait sumber daya manusia di pulau kecil diharapkan dapat terus meningkat, dengan cara adanya pelatihan masyarakat lokal mengenai wisata. Adanya pemanfaatan lahan yang ada di pulau kecil juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah, selain itu pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang juga perlu dilakukan. Pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang meliputi mangrove, laut, dan agroforestri. Implementasi kebijakan dari pemerintah perlu diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik. Contohnya seperti aturan dari status kepemilikan lahan di Pulau Pahawang perlu diperhatikan khususnya kepemilikan dari individu luar pulau yang perlu dibatasi.

Perlunya pembuatan aturan desa yang disahkan oleh pemerintah pusat mengenai pariwisata di Pulau Pahawang. Masyarakat lokal sebagian besar diharuskan dapat berpartisipasi di kawasan wisata. Pada kepemilikan industry wisata dari luar seperti *cottage/villa*, diutamakan masyarakat lokal mendapat pekerjaan di wilayah tersebut. Tempat ibadah diharapkan dapat diberikan fasilitas berupa mukena dan sarung untuk solat. Toilet umum atau MCK harus sangat diperhatikan dalam kebersihannya, agar tidak berbau dan nyaman digunakan. Rekomendasi warung makan diharapkan ada pada setiap spot potensi wisata, tujuannya adalah wisatawan yang datang tidak kesulitan untuk mencari makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W., D.R. Zulkia, K. Salim, A. Pamungkas. 2019. Implementasi pola tata ruang Desa Pesisir di Kabupaten Bangka Selatan (Studi Kasus Desa Tukak). *Akuatik: Jurnal Sumber daya Perairan*. 13(1): 61-67.
- Afifah, F.A.N. 2020. Identifikasi Pola Dan Dinamika Agroforestri di Pulau Pahawang Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Skripsi. 58 hlm.
- Afifah, F.A.N., I.G. Febryano, T. Santoso, A. Darmawan. 2021. Identifikasi perubahan penggunaan lahan agroforestri di Pulau Pahawang. *Journal of Tropical Marine Science*. 4(1): 1-8.
- Akbar, M. 2017. Analisis kerentanan pulau-pulau kecil di Kecamatan Togeang Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Kasus P. Kukumbi, P. Enam, P. Mogo, P. Kadidiri, P. Pagempa, P. Tongkabo). *Omni-Akuatika*. 12(3): 59-70.
- Alfandi, D., R. Qurniati, I.G. Febryano. 2019. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 30-41.
- Alfatikha, M., S. Herwanti, I.G. Febryano, S.B. Yuwono. 2020. Identifikasi jenis tanaman agroforestri untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga di Desa Pulau Pahawang. *Gorontalo Journal of Forestry Research*. 3(2): 55-63.
- Al-Khoiriah, R., F.E. Prasmatiwi, M.I. Affandi. 2017. Evaluasi ekonomi dengan metode travel cost pada taman wisata Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*. 5(4):352-359.
- Aminah, N.L., R. Safe'i, I.G. Febryano. 2017. Analisis kelembagaan gabungan kelompok tani di wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung. *Jurnal Sylva Indonesiana*. 1(1): 29-35.
- Anggara, G.D., I.G. Febryano, T. Santoso, A. Darmawan. 2020. Faktor-faktor perubahan lahan mangrove di Pulau Pahawang. *Prosiding Seminar Nasional Konservasi*. 67-71 pp.

- Apriandana, F., R. Safe'i, I.G. Febryano, H. Kaskoyo. 2021. Kinerja lembaga pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. *Ulin Jurnal Hutan Tropis*. 5(1): 17-27.
- Apriliawan, B., I.G. Yudha, S. Suparmono, A.A. Damai. 2020. Ketersediaan membayar wisatawan terhadap upaya pelestarian mangrove di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Journal of Aquatica Asia*. 5(2): 16-22.
- Bahits, A., M.F. Komarudin, R.I. Afriani. 2020. Strategi pengembangan tempat wisata religi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Gunung Santri Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*. 6(2): 55-60.
- Barnett, J., E. Waters. 2016. Rethinking the vulnerability of small island states: Climate change and development in the pacific islands. *The Palgrave Handbook of International Development*. 1(1): 731-748.
- Bhudiarty, S., K. Ratnasari, D. Marizka. 2019. Analisis potensi wisata bahari dan budaya di Belitung, Kab. Belitung Barat. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(2): 36-51.
- Bindu, G., P. Rajan, E.S. Jishnu, K.A. Joseph. 2017. Carbon stock assessment of mangroves using remote sensing and geographic information system. *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences*. 23(1): 1-9.
- Budianto, P.F., E. Susilo, E. Indrayani. 2013. Implementasi pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil terhadap masyarakat pesisir Desa Lihunu, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. *ECSoFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine)*. 1(1): 1-10.
- Buli, W., S. Bakri, I.G. Febryano. 2018. Kelembagaan pertambangan batubara di Hutan Rakyat. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 81-90.
- Cahyadi, F.D., N. Khakhim, D. Mardiatno. 2018. Integrasi SWOT dan AHP dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Kawasan Wisata Bahari Gugusan Pulau Pari. *Jurnal Pariwisata Pesona*. 3(2): 105-118.
- Cherian, A. 2007. Linkages between biodiversity conservation and global climatechange in Small Island Developing States (SIDS). *Natural Resources Forum*. 31(2): 128–131.
- Danial, E., Warsiah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung.
- Darmawan, B., D. Mardiatno. 2015. Analisis kerusakan terumbu karang akibat sampah di Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Bumi Indonesia*. 4(1): 222846.

- Davinsy, R., A. Kustanti, R. Hilmanto. 2015. Kajian pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(3):95-106.
- Dede, P., W. Sayekti, N. Rosanti. 2014. Analisis pendapatan dan strategi pengembangan budidaya rumput laut di Pulau Pahawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*. 2(1): 56-63.
- Demir, S., D. Bryde, D. Fearon. 2015. Three dimensional stakeholder analysis–3dSA: adding the risk dimension for stakeholder analysis. *Int. J. Project Organisation and Management*. 7(1): 15-30.
- Delinom, R.M., R.F. Lubis. 2007. *Air Tanah di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam: Delinom, RM (editor). Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia*. LIPI Press. Jakarta.
- Dewi, I.M. 2013. *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional di Kabupaten Slmean dalam Ekonomi Politik*. (Disertasi). Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 167 hlm.
- Elva, E., H. Kaskoyo, I.G. Febryano, S.B. Yuwono. 2017. Kajian kelembagaan gabungan kelompok tani dalam program kemitraan di KPHP Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*. 5(1): 1-7.
- Falkland, A.C. 1993. Hydrology and water management on small tropical islands. Di dalam *Hydrology of Warm Humid Regions (Yokohama Symposium)*, July 1993, Yokohama. *Yokohama (JP): IAHS*. 216 (263-303).
- Fauzi, A.N., D. Rostyaningsih. 2018. Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*. 7(4): 356-374.
- Febrianti, M.I., F. Purwanti, A. Hartoko. 2018. Analisis keterpaparan ekosistem terumbu karang akibat aktivitas pariwisata di Pulau Menjangan Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. 10(1): 15-24.
- Febryano, I.G. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125-142.
- Febryano, I.G., R. Safe'i, I.S. Banuwa. 2017. Performa pengelolaan agroforestri di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa. *Jurnal Hutan Tropis*. 5(2): 127-133.

- Febryano, I.G., D. Suharjito, D. Darusman, C. Kusmana, A. Hidayat. 2014. The roles and sustainability of local institutions of mangrove management in Pahawang Island. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20(2): 69-76.
- Filipus, T., B.H. Wibisono. 2021. Peran dan koordinasi *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Jembatan Youtefa. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. 2(8): 1438-1447.
- Freeman, R.E., R. Phillips, R. Sisodia. 2020. Tensions in stakeholder theory. *Business & Society*. 59(2): 213-231.
- Friedrich, C.J. 1963. *Man and His Government*. McGraw-Hill. Newyork.
- Godovykh, M., A. D. Tasci. 2020. Customer experience in tourism: a review of definitions, components, and measurements. *Tourism Management Perspectives*. 35(2020): 1-10.
- Hakim, L., W. Lazuardi, I.S. Astuty, A.A. Hadi, R. Hermayani, D.D.P. Novandias, A.C. Dewi. 2018. Penilaian kesehatan terumbu karang menggunakan Citra Satelit Worldview-2 di Pulau Pahawang, Lampung, Indonesia. *Seminar Nasional Geomatika*. D.I. Yogyakarta. 125 hlm.
- Hanum, I.F., F.M. Yusoff, A. Fitrianto, N.A. Ainuddin, S. Gandaseca, S. Zaiton, K. Norizah, S. Nurhidayu, M.K. Roslan, K.R. Hakeem, I. Shamsuddin, I. Adnan, A.G.A. Noor, A.R.S. Balqis, P.P. Rhyma, I.S. Aminah, F. Hilaludin, N.Z.N. Harun. 2019. Development of a comprehensive Mangrove Quality Index (MQI) in Matang Mangrove: Assessing mangrove ecosystem health. *Ecological Indicators*. 102: 103-117.
- Hartati, L.H., L. Harudu. 2016. Identifikasi jenis-jenis kerusakan ekosistem hutan mangrove akibat aktivitas manusia di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*. 1(4): 30-45.
- Hasmiati, H., M. Massyat, S. Yuyun. 2021. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan sektor pariwisata di Desa Kayuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). *Journal Peguruang: Conference Series*. 3(2): 866-874.
- Hehanussa, P.E., P. Hartanto. 2005. Sumber Daya Air di Pulau Nusalaut, Maluku Tengah. Di dalam: Hehanussa, PE, Bakti, H (editor). *Sumber Daya Air di Pulau Kecil*. Jakarta (ID): LIPI Press.
- Herdiana, D. 2018. Sosialisasi kebijakan publik: pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. 1(3): 13-26.
- Hidayah, Z., D.M. Rosyid, H.D. Armono. 2016. Planning for sustainable small island management: Case study of Gili Timur Island East Java Province Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 227: 785-790.

- Huong, T., Nguyen., T. Phuong, T. Ngo. 2018. Land use/land cover change prediction in Dak Nong Province based on remote sensing and markov chain model and cellular automata. *Jurnal Viet. Env.* 9(3): 132-140.
- Hutasoit, N. 2017. Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan jumlah hunian hotel terhadap penerimaan Sub Sektor PDRB Industri Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2013. *JOM Fekon.* 4(1): 647-661.
- Iriany, I.S., R. Pasciana, M. Mulyaningsih, I. Febrina. 2021. Nilai-nilai moral dan spiritual; Pengaruh wisata religi terhadap peluang ekonomi rakyat. *Tourism Scientific Journal.* 7(1): 155-170.
- Iswandaru, D., I.G. Febryano, T. Santoso, H. Kaskoyo, G.D. Winarno, R. Hilmanto, D. Zulfiani. 2020. Bird community structure of small islands: a case study on the Pahawang Island, Lampung Province, Indonesia. *Silva Balcanica.* 21(2): 5-18.
- Jainah, Z.O., L.A. Marpaung. 2017. Pelaksanaan kearifan lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum.* 8(2):40-44.
- Jepsen, A.L., P. Eskerod. 2009. Stakeholder analysis in projects: Challenges in using current guidelines in the real world. *International journal of project management.* 27(4), 335-343.
- Jubaedah, I., P. Anas. 2019. Dampak pariwisata bahari terhadap ekosistem terumbu karang di Perairan Nusa Penida, Bali. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.* 13(1): 59-75.
- Jumali, J., N. Farhan, O. Razma, N.F. Amalia, S. Sudarmiati. 2017. Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi penanganan pencemaran lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam. *Jurnal Selat.* 5(1): 25-35.
- Kanom, K., R.N. Darmawan, N. Nurhalimah. 2020. Sosialisasi Penerapan Sapta Pesona Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Di Lider Desa Sumberarum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat.* 2(1): 24-32.
- Karyono, A.H. 1997. *Kepariwisataaan.* Jakarta. Grasindo.
- Kastanya, A. 2016. Konsep pertanian pulau-pulau kecil berbasis gugus pulau menghadapi perubahan iklim global di Provinsi Maluku. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil.* 1(1): 1-10.
- Kelman, I. 2018. Islandness within climate change narratives of Small Island Developing States (SIDS). *Island Studies Journal.* 13(1): 149-166.

- Kesumayuda, P., M. Mahrinasari, D.R.H. Pandjaitan. 2020. The impact of e-wom on trust and interest visiting the destination of Pahawang Island Tourism, Pesawaran District. *International Journal of Economics and Management Studies*. 7(10): 50-54.
- Khatulistiyawati, N., I. Kinasih, E. Diswanto, E. Kurniawan, M. Irfan. 2021. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Kampung Wisata Ekoriparian Geblak Jambangan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 2(2): 317-326.
- Khrisnamurti, K., H. Utami, R. Darmawan. 2017. Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu. *Kajian*. 21(3): 257-273.
- Koroy, K., F. Yulianda, N.A. Butet. 2017. Pengembangan ekowisata bahari berbasis sumber daya pulau-pulau kecil di Pulau Sayafi dan Liwo, Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 8(1): 1-17.
- Kumar, S.V., K. Malarvizhi, P. Porchelvan. 2016. Use of high resolution google earth satellite imagery in landuse map preparation for urban related application. *Procedia Technology*. 24(2): 1835-1842.
- Kurniawan, F., R.F. Darus, I. Rizaki. 2017. Kebutuhan pengelolaan wisata di Pulau Gili Labak, Sumenep: Euforia destinasi wisata baru. *Coastal and Ocean Journal*. 1(1): 7-15.
- Kusnadi, D., M. Sandra. 2020. Pengaruh perilaku pengunjung terhadap loyalitas konsumen pada Desa Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Entrepreneur dan Bisnis (JEBI)*. 1(1): 17-23.
- Laapo, A., A. Fahrudin, D.G. Bengen, A. Damar. 2009. Pengaruh aktivitas wisata bahari terhadap kualitas perairan laut di Kawasan Wisata Gugus Pulau Toge. *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences*. 14(4): 215-221.
- Lahandu, J., R.C. Tarumingkeng, H. Kartodihardjo. 2007. Analisis kebijakan pengelolaan akses sumber daya alam oleh Masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah. *Agrisains*. 17(1): 24-33.
- Laksono, A.N., M. Mussadun. 2014. Dampak aktivitas ekowisata di Pulau Karimunjawa berdasarkan persepsi masyarakat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*. 3(2): 262-273.
- Larasati, A.P., C. Wulandari, I.G. Febryano, H. Kaskoyo. 2021. Peran kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*. 4(1): 39-47.

- Lasabuda, R. 2013. Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*. 1(2): 92-101.
- Latupapua, Y. 2015. Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*. 10(1): 1907-7556.
- Lumbessy, H., J. Rengkung, P.H. Gosal. 2015. Strategi konservasi ekosistem mangrove Desa Mangega dan Desa Bajo sebagai destinasi ekowisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Spasial*. 2(3): 192-200.
- Ma'ariq Badrutamam, S., A. Satriadi, A. Ismanto. 2020. Studi batimetri dan topografi dasar laut untuk penentuan jalur peletakan kabel bawah laut di Perairan Lampung–Pulau Pahawang. *Indonesian Journal of Oceanography [May]*. 2(02): 2714-8726.
- Magfira, Z., R. Rihendra, Y. Polisda. 2021. Pengembangan objek wisata Pantai Kito Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Kajian Pariwisata dan Bisnis Perhotelan*. 2(1): 53-58.
- Mahfud, M.A.Z., B.S. Haryono, N.L.V. Anggraeni. 2015. Peran dan koordinasi stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(12): 2070-2076.
- Makchul, A.M. 2021. Pola koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*. 2(3). 113-124.
- Mapahena, M.I., A.B. Pati, D. Tampongangoy. 2021. Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. *Agri-Sosioekonomi*. 17(2): 399-404.
- Mardani, A., F. S. Purwanti, Rudiyaniti. 2018. Strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Pulau Pahawang Provinsi Lampung. *Jurnal Maquares*. 6(1):1-9.
- Mardiana, M., M.A. Muhammad, Y. Mulyani, W.E. Sulistiono. 2019. Augmented reality pada aplikasi cinta bahari sebagai media promosi Pulau Pahawang. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 3(3): 116-121.
- Mardiyana, E., R.D. Dienaputra, A.K. Yuliawati, E. Novianti, U.L.S. Khadijah. 2021. Potensi wisata religi serta makna ziarah di Gunung Srandil Kabupaten Cilacap. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 1(10): 2263-2272.
- Martin, C., H. Almahasheer, C.M. Duarte. 2019. Mangrove forests as traps for marine litter. *Environmental Pollution*. 247: 499-508.

- Martuti, N.K.T. 2013. Keanekaragaman Mangrove di Wilayah Tapak, Tugurejo, Semarang. *Jurnal Mipa*. 36(2): 123-130.
- Masithah, D., A. Kustanti, R. Hilmanto. 2016. Nilai ekonomi komoditi hutan mangrove di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1): 69-80.
- Mawaza, J.F., A. Khalil. 2020. Masalah sosial dan kebijakan publik di Indonesia (Studi kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*. 2(1): 22-31.
- Michalena, E., Kouloumpis, J.M. Hills. 2017. Challenges for pacific small island developing states in achieving their Nationally Determined Contributions (NDC). *Energy Policy*. 114: 508-518.
- Mira, M. 2017. Keunggulan sub sektor perikanan dan pariwisata bahari dalam struktur perekonomian wilayah pulau-pulau kecil. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 8(2): 145-156.
- Mubarog, H., A.W. Sholeha. 2022. Upaya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengembangkan potensi lokal Rawa Tirta di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 3(2): 666-673.
- Muflih, A., A. Fahrudin, Y. Wardiatno. 2015. Kesesuaian dan daya dukung wisata Pesisir Tanjung Pasir dan Pulau Untung Jawa. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 20(2): 141-149.
- Munir, U., K. Dimiyati, A. Absori. 2018. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*. 4(2): 128-137.
- Mustafa, A.F., P.J. Franklin, C.E. Wuisang. 2019. Evaluasi kebijakan pemerintah di bagian infrastruktur untuk mendukung Kota Tidore Kepulauan sebagai kota jasa berbasis agromarine. *Spasial*. 6(3): 839-850.
- Mustika, I.Y., A. Kustanti, R. Hilmanto. 2017. Kepentingan dan peran aktor dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2):113-127.
- Mwelusepo, S., E. Muli, A. Faki, S. Raina. 2016. Land use and land cover data changes in Indian Ocean Islands: Case study of Unguja in Zanzibar Island. *Data in Brief*. 11: 117-121.
- Nugraha, Y.E., E.R.L. Enga. 2021. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan daya tarik wisata alam di Kabupaten TTS: Studi kasus daya tarik wisata Pantai Oetune. *Media Wisata*. 19(1): 66-70.

- Nugroho, R. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan- Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan)*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nurdin, N. 2010. Kajian efektifitas kebijakan pada kasus destructive fishing menuju pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat pada pulau-pulau kecil (studi kasus pada Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan). *Jurnal Bumi Lestari*. 10(2): 242-255.
- Nurhasanah, I.S., N.N. Alvi, C. Persada. 2017. Perwujudan pariwisata berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat lokal di Pulau Pahawang, Pesawaran, Provinsi Lampung. *Tata Loka*. 19(2): 117-128.
- Nurjanah, R. 2012. Studi persepsi dampak perubahan pemanfaatan lahan terhadap kunjungan wisata di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 23(2): 139-156.
- Nurlinda, I. 2017. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap penegakan hukum lingkungan indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*. 1(1): 1-9.
- Ogelang, D., I. Rachman, F.N. Pangemanan. 2021. Peran dinas pariwisata daerah dalam mengelola sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Governance*. 1(2): 1-10.
- Onat, Y., M. Marchant, O.P. Francis, K. Kim. 2018. Coastal exposure of the Hawaiian Islands using GIS-based index modeling. *Ocean and Coastal Management*. 163: 113-129.
- Oprasmani, E., T. Amelia, E. Muhartati. 2020. Membangun masyarakat peduli lingkungan pesisir melalui edukasi kepada masyarakat kota tanjungpinang terkait pelestarian daerah pesisir. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(2): 66-73.
- Pangaribuan, M.T., A.I. Munandar. 2021. Analisis stakeholder dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 6(2): 60-66.
- Pasolong, H. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Pelling, M., J. Uitto. 2001. Small island developing states: natural disaster vulnerability and global climate change. *Environmental Hazards*. 3: 49-62.
- Persada, C., N.N. Alvi, I.S. Nurhasanah. 2018. Evaluasi keberlanjutan wisata bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. *Plano Madani*. 7(1): 59-68.

- Pham, L.T.H., T.Q. Vo, T.D. Dang, T.N.N. Uyen. 2019. Monitoring mangrove association changes in the Can Gio Biosphere Reserve and implications for management. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*. 13: 298-305.
- Pigawati, B. 2005. Identifikasi potensi dan pemetaan sumber daya pesisir pulau-pulau kecil dan laut Kabupaten Natuna-Provinsi Kepulauan Riau. *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences*. 10(4): 229-236.
- Pigawati, B. 2012. Aplikasi penginderaan jauh untuk perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Teknik*. 33(1): 20-24.
- Pinontoan, N.A. 2022. Strategi pengembangan pariwisata Indonesia bagi para investor pemula. *Artinara*. 1(02): 20-24.
- Polyakov, I.V., A.V. Pnyushkov, L.A. Timokhov. 2012. Warming of the Intermediate Atlantic Water of the Arctic Ocean in the 2000s. *Journal of Climate*. 25(23): 8362-8370.
- Prakoso, K., Supriharyono., Ruswahyuni. 2015. Kelimpahan epifauna di substrat dasar dan daun lamun dengan kerapatan yang berbeda di Pulau Pahawang Provinsi Lampung. *Journal of Management of Aquatic Resources*. 4(3): 117-122.
- Pramono, J., W. Kinasih. 2019. Sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri*. 3(1): 298-309.
- Prasetyo, B. 2012. Kajian teoretik karakter kebijakan publik. *Jurnal Politik Indonesia*. 1(1): 1-10.
- Prasetyo, M.A., M. Musta'in, H. Ikhwani. 2021. Pemberdayaan potensi wisata Pantai Kenjeran Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*. 9(2): 137-142.
- Prayoga, R., Z.T. Lubis, A.A. Dalimunthe. 2022. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan fungsi pengawasan anggaran. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 3(3). 380-388.
- Priyanto, S.E. 2016. Dampak perkembangan pariwisata minat khusus snorkeling terhadap lingkungan: Kasus Destinasi Wisata Karimunjawa. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*. 10(3): 13-28.
- Qodriyatun, S.N. 2019. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Jurnal Aspirasi*. 9(2): 240-259.
- Razak, A., R. Suprihardjo. 2013. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu di Kepulauan Seribu. *Jurnal Teknik ITS*. 2(1): 14-19.

- Reed, M.S., A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, L.C. Stringer. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*. 90(5): 1933-1949.
- Rengganis, L.D., F. Faturrahim, R. Kurniansah. 2021. Peranan tokoh adat dalam pelestarian rumah adat Dusun Beleq Desa Wisata Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Journal of Responsible Tourism*. 1(2): 63-74.
- Rif'an, A.A. 2018. Daya tarik wisata Pantai Wediombo sebagai alternatif wisata bahari di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Geografi*. 10(1): 63-73.
- Romadhon, A. 2014. Strategi konservasi pulau kecil melalui pengelolaan perikanan berkelanjutan (Studi kasus Pulau Gili Labak, Sumenep). *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*. 7(2): 86-93.
- Rosana, M. 2018. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*. 1(1): 148-163.
- Saadah, M., M.N. Sampoerno, Z. Triansyah, F. Chaniago. 2021. Pengembangan Pengelolaan Pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa di Jambi. *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora*. 1(2): 182-192.
- Safitri, A.D., A. Darmawan, D. Iswandaru, G.D. Winarno. 2020. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan lutung kelabu (*Trachypithecus cristatus*) di Pulau Pahawang. *Prosiding Seminar Nasional Konservasi 2020*. LPPM Universitas Lampung. 1-5 hlm.
- Salsabila, F.A., N. Fadilla, Y.P. Sari, 2022. Peranan *stakeholder* untuk pengembangan objek wisata. *Jurnal PUSDANSI*. 2(1): 1-8.
- Sapitri, D. 2021. Agenda setting dalam proses kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah. *Jurnal Sosial Teknologi*. 1(2): 50-56.
- Sari, L., N.I.B.S. Sitorus. 2021. Kolaborasi *stakeholder* pariwisata dalam pengelolaan akomodasi di Desa Wisata Kabupaten Purwakarta di masa pandemi covid-19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(9): 1489-1496.
- Sari, N.I., F. Wajdi, S. Narulita. 2018. Peningkatan spiritualitas melalui wisata religi di Makam Keramat Kwitang Jakarta. *Jurnal Studi Al-Qur'an*. 14(1): 44-58.
- Schaduw, J.N.W. 2018. Distribusi dan karakteristik kualitas perairan ekosistem mangrove pulau kecil Taman Nasional Bunaken. *Majalah Geografi Indonesia*. 32(1): 40-49.

- Shafira, M., M. Anwar. 2021. Model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 11(2): 103-117.
- Simarangkir, O.R., P.B. Utami, F. Tawang, T. Kodiran. 2021. Study on suitability of Derawan Island as marine tourism destination towards development of sustainable tourism in the new capital city candidate of Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 890(1): 15960–15985.
- Spalding, M., L. Burke, S.A. Wood, J. Ashpole, J. Hutchison, P. Zu Ermgassen. 2017. Mapping the global value and distribution of coral reef tourism. *Marine Policy*. 82(2017): 104-113.
- Suharto, E. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung. 238 hlm.
- Suriadarma, A., R. Delinom. 2005. *Potensi dan Kualitas Air Tanah di Pulau Batam*. LIPI Press. Jakarta.
- Susanthiasih, P., R. Rusliani. 2017. Pelayanan dan fasilitas wisata pulau pahawang di tinjau dari perspektif ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. 8(02): 125-135.
- Sutedi, E., I. Herdiawan, E. Handiwirawan. 2017. Pulau-pulau kecil terluar Indonesia untuk lokasi karantina dan pengembangan ternak. *Wartazoa*. 27(4): 187-196.
- Suyadi., C.Y. Manullang. 2020. Distribution of plastic debris pollution and it is implications on mangrove vegetation. *Marine Pollution Bulletin*. 160: 111642.
- Swangjang, K., P. Kornpiphat. 2021. Does ecotourism in a mangrove area at Klong Kone, Thailand, conform to sustainable tourism? A case study using SWOT and DPSIR. *Environment, Development and Sustainability*. 23(11): 15960-15985.
- Syarif, F., P. Lestari, A.H. Wawo. 2014. Variasi karakteristik pertumbuhan *Tacca leontopetaloides* (L) Kuntze (taccaceae) di Pulau Jawa dan Pulau-Pulau Kecil sekitarnya. *Berita Biologi*. 13(2): 161-171.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung Puslit KP2W Lemlit UNPAD. Bandung.

- Tahir, A., M. Boer, S.B. Susilo, I. Jaya. 2009. Indeks kerentanan pulau-pulau kecil: kasus Pulau Barrang Lompo-Makasar. *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences*. 14(4). 183-188.
- Talib, D. 2021. Analisis peran *stakeholder* dalam pengembangan destinasi wisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)*. 3(1): 12-18.
- Tanjung, D.N. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Teelucksingh, S., P.A.L.D. Nunes, C. Perrings. 2013. Biodiversity-based development in Small Island Developing States. *Environment and Development Economics*. 18(4): 381-391.
- Thaha, R. 2009. Penataan kelembagaan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2(1): 39-62.
- Utami, S., S. Anggoro, T.R. Soeprbowati. 2017. The diversity and regeneration of mangrove on Panjang Island Jepara Central Java. *International Journal of Conservation Science*. 8(2): 289-294.
- Wahab, A.S. 2002. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Reneka Cipta. Jakarta.
- Wahyuni, P. 2020. *Perencanaan wisata lutung Trachypithecus cristatus (Raffles, 1821) berbasis konservasi di Pulau Pahawang*. FP. Unila. 93 hlm.
- Wahyuni, P., I.G. Febryano, D. Iswandaru, B.S. Dewi. 2020. Sebaran lutung Trachypithecus cristatus (Raffles, 1821) di Pulau Pahawang, Indonesia. *Jurnal Belantara*. 3(2): 89-96.
- Walshe, R.A., C.E. Stancioff. 2018. Small island perspectives on climate change. *Island Studies Journal*. 13(1): 13-24.
- Wati, S.A.K., M. Hubeis, M. Sarma. 2019. Strategi pengembangan usaha kapal wisata berbasis model bisnis kanvas di Pulau Pahawang Lampung. *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*. 14(2), 143-151.
- Widiana, F., R. Wikantiyoso. 2018. Implementasi kearifan lokal dalam strategi pengembangan wisata Pantai Sendang Biru untuk pelestarian Pulau Sempu. *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*. 10(1): 9-17.
- Wilson, R. 2017. Impacts of climate change on mangrove ecosystems in the coastal and marine environments of Caribbean Small Island Developing States (SIDS). *Caribbean Climate Change Report Card: Science Review*. 2017: 61-82.

- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Wulandari, C., S. Herwanti, I.G. Febryano. 2018. Peran kelembagaan nagari dalam pengelolaan hutan di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. *Gorontalo Journal of Forestry Research*. 1(2): 30-39.
- Yuliana, D., A. Rahmasari. 2021. Kelimpahan dan distribusi ikan karang di Perairan Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran Lampung. *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan*. 4(1): 280-289.
- Yulianti., K. Amirus, R. Ellya. 2013. Hubungan perilaku masyarakat dengan kejadian malaria di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran tahun 2013. *Jurnal Dunia Kesmas*. 2(4): 253–258.
- Yuniningsih, T. 2015. Analisis kebijakan pengelolaan obyek wisata Taman Wisata Margasatwa Mangkang Semarang. *Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. 1(1): 104-116.
- Yurista, A.P. 2020. Meninjau perencanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunung Kidul dalam perspektif penataan ruang yang integratif. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 32(3): 436-449.
- Yurista, A.P., D.A. Wicaksono. 2017. Kompatibilitas rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai rencana tata ruang yang integratif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6(2): 183-198.
- Zaini, T.M., T. Rosandy, I.A. Sari. 2020. Rancang bangun tour guide Pulau Pahawang berbasis android. *SIMADA (Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data)*. 3(1): 17-22.
- Zulrizkan, A.P., H.S. Hasibuan, R.H. Koestoer. 2019. Peran informasi geospasial dalam mendukung penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim kajian di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu. *Seminar Nasional Geomatika*. 3: 841-850.